

PEMBANGUNAN DESA MANDIRI MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA

Fatmawati¹, Lukman Hakim², Mappamiring³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar
e-mail: fatmawati@gmail.com

Abstract

Community participation in village development activities is very important to note. The purpose of this study was to analyze community participation in building an independent village in Pattallassang District, Gowa Regency. Descriptive qualitative research methods used in this study with data collection techniques using observation, documentation, and interviews. Stages of data analysis performed are data reduction, data display, and conclusion drawing / verification. The results showed that community participation in building independent villages in Pattallassang District, Gowa Regency was considered not optimal, seen from the aspects (1) Community participation in the planning process; (2) Community participation in implementing development programs; (3) Community participation in creating employment; and (4) Community participation in increasing economic business activities.

Keywords: *Community participation, independent village development.*

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa sangat penting untuk diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tahapan analisis data yang dilakukan, adalah reduksi data, data display (penyajian data), dan conclusion drawing/ verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dinilai belum optimal, dilihat dari aspek (1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan; (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan; (3) Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja; dan (4) Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, pembangunan desa mandiri.

1. PENDAHULUAN

Dukungan dalam mewujudkan visi Undang-Undang Desa adalah dengan mengembangkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan berkepribadian. Pembaruan Desa merupakan keniscayaan yang harus ditempuh melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan perundangan turunannya.

Guna mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan daerah, mutlak dilakukan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah serta organisasi civil society agar dapat mengambil peranan yang tepat dalam interaksi demokratis serta proses pembangunan secara komprehensif.

Pembangunan pada era desentralisasi ini harus lebih memiliki dimensi peningkatan

sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat dan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Peran serta masyarakat secara langsung sangat diperlukan dan perlu terus diperkuat serta diperluas.

Istilah partisipasi bukan sekadar retorika semata, tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Keberhasilan pemerintahan dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, tetapi juga atas ketertarikan, keikutsertaan, dan dukungan dari masyarakatnya. Demokrasi yang sehat tergantung pada bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Dewasa ini dalam membangun desa, harus lebih mengedepankan pada partisipasi masyarakat. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pembangunan yang intensif. Tanpa dukungan dan partisipasi penduduk maka pembangunan tidak akan berhasil. Seperti kondisi yang terjadi di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di beberapa desa di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa terlihat masih rendah. Dari 8 (delapan) jumlah desa yang ada, beberapa desa masih terlihat rendah partisipasi masyarakatnya dalam proses pembangunan desa, seperti di Desa Pattallassang, Desa Sunggumanai, dan Desa Borong Pa'la'la.

Rendahnya partisipasi masyarakat dapat terlihat dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah Kabupaten Gowa, yakni program Sabtu Bersih dan Jum'at Ibadah. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pemerintah juga masih terbatas pada keikutsertaan semata, seperti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) atau Musyawarah Desa (Mudes). Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat, disertai pemahaman yang rendah dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Faktor lain yang mempengaruhi kurangnya tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pattallassang adalah, karena pada umumnya masyarakat bekerja sebagai petani dan banyak juga yang bekerja di luar desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini, adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Desa

Siagian (2005: 108), menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama.

Kartasmita (2001:66), mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Adapun tujuan pembangunan desa, adalah: (1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan kabupaten; (2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan; (3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman, dan sehat; (4) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perbatasan; (5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah; (6) Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah; dan (7) Pembangunan perdesaan.

Konsep Desa Mandiri

Desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi suatu desa menuju desa mandiri, adalah potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi pembeli (pasar), kelembagaan, dan budaya lokal.

Konsep desa mandiri adalah pola pengembangan pedesaan berbasis konsep terintegrasi mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan dukungan (supporting system). Pengembangan yang akan dilakukan pada desa mandiri, adalah pengembangan

potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa, pengembangan kemandirian berusaha dan kewirausahaan di desa, pengembangan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat desa, serta pengembangan jejaring dan kemitraan.

Manfaat dari desa yang telah mandiri, adalah berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja, meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa, meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, serta menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Davis (Ndraha, 1987: 37), mengartikan partisipasi sebagai suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakkan mereka untuk bersama-sama mencapai tujuan dan bersama-sama bertanggung jawab. Nelson (Bryant & White, 1982: 206), menyebutkan 2 (dua) macam partisipasi, yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara klien dengan patron, atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama partisipasi vertikal.

Cohen dan Uphoff (1977: 3), menyatakan bahwa partisipasi dapat merupakan keluaran pembangunan dan juga merupakan masukannya, sebab jika masyarakat yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di desanya, maka proyek itu pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan desa.

Berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, orang akan menemukan rumusan pengertian yang cukup bervariasi, sejalan dengan luasnya lingkup penggunaan konsep tersebut dalam wacana pembangunan. Mikkelsen (1999) dikutip Soetomo (2013: 473) misalnya, menginvestasikan adanya enam tafsiran dan makna yang berbeda tentang partisipasi, yaitu: (1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; (2) Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan dalam menanggapi proyek-proyek pembangunan; (3) Partisipasi adalah proses aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan untuk melakukan hal itu; (4) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial; dan (5) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dalam penelitian ini, guna menganalisis partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, akan ditinjau dari: (1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan; (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan; (3) Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja; dan (4) Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan memaparkan keadaan pembangunan desa di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa melalui partisipasi masyarakat demi tercapainya desa yang mandiri.

Jenis data yang digunakan, adalah data primer (data utama) yang bersumber dari informan penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh melalui media perantara dari literatur-literatur, catatan, atau laporan historis dari pemerintah Kabupaten Gowa dan Pemerintah Desa di Kecamatan Pattallassang.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan penelitian ini, yaitu pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Pendamping Lokal Desa Kecamatan Pattallassang, Pemerintah Wilayah Kecamatan Pattallassang (Camat dan Kepala Desa), dan tokoh masyarakat. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan, adalah reduksi

data, *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menguraikan temuan penelitian yang dianalisis, berdasarkan: (1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan; (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan; (3) Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja; dan (4) Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

Berikut beberapa hasil wawancara terkait partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa Pattallassang:

“Perencanaan untuk menyusun RPJMD diawali dengan adanya musyawarah di tingkat dusun. Disinilah masyarakat berperan dalam melakukan penggalan gagasan. Kepala dusun bekerja sama dengan RT/RW dan tokoh masyarakat di dusunnya melakukan penggalan gagasan dan mencari potensi di dusunnya masing-masing. Rembukan hasil analisis program-program tersebut yang selanjutnya diusulkan pada saat Musrebang desa.”

Kepala Desa Sunggumanai juga mengatakan:

“Sejauh yang kami amati, masyarakat telah melaksanakan perannya dengan baik. Hal ini sangat membantu pemerintah desa. Perencanaan partisipatif dipenggalan gagasan ini memakai 3 (tiga) alat kajian, yakni sketsa desa, kelembagaan, dan kelender musim. Penting melakukan penyusunan di tingkat paling bawah, karena yang mengetahui kondisi dan kebutuhan di dusunnya masing-masing adalah RT/RWnya.”

Lebih lanjut, Kepala Desa Sunggumanai mengatakan:

“Musdus mengusulkan kebutuhan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Masalah-masalah yang didapatkan di dusun melahirkan daftar panjang yang selanjutnya diklasifikasi. Program yang menjadi prioritas utama ditempatkan di

tahun pertama, tahun ke dua dan seterusnya. RPJM Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat di dusun ini sangatlah efektif dan efisien untuk menangani setiap permasalahan di desa.”

Adapun hasil wawancara dengan Camat Pattallassang mengatakan:

“Dengan melibatkan masyarakat, berarti ikut memberdayakan mereka. Artinya, program yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, dari proses itu juga mereka bukan hanya mendapatkan pengalaman tetapi juga ikut berkontribusi untuk wilyahnya.”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa proses perencanaan partisipatif telah dilaksanakan hampir di seluruh jajaran pemerintahan desa di Kabupaten Gowa. Perencanaan dari desa mulai dari penyusunan RPJM Desa untuk 6 tahun yang kemudian direvitalisasi menjadi RKPD Desa untuk rencana kerja desa untuk setiap tahunnya. Sebelum disampaikan ke MUSRENBANG tingkat desa, terlebih dahulu para tokoh-tokoh masyarakat melakukan penggalan gagasan di dusunnya masing-masing.

Masyarakat lokal terlihat sangat tahu akan apa yang mereka butuhkan dan mereka memiliki hak dan kemampuan untuk menyatakan pikiran dan kehendaknya. Jika proyek dan program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat lokal didasari oleh keputusan yang diambil oleh masyarakat sendiri, maka program tersebut akan lebih relevan dan lebih menyentuh permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Perencanaan dari bawah ini merupakan langkah yang tepat untuk menjawab keresahan masyarakat. Dan secara umum di Kecamatan Pattallassang, masyarakat merespon baik niat pemerintah untuk melibatkan mereka dalam proses perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan

Berikut beberapa hasil wawancara terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, sebagaimana yang

disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa Pattallassang, bahwa:

“Untuk program pembangunan fisik, kita tidak melibatkan begitu banyak orang. Misalnya, untuk pembangunan jalan atau drainase di dusun, maka pekerjanya berasal dari dusun yang bersangkutan. Secara otomatis, pemberdayaan masyarakat diupayakan merata dengan melakukan pembagian pekerjaan seperti itu.”

Begitupun hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Borong Pa’la’la, bahwa:

“Sangat baik melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan program pembangunan pemerintah desa, karena antara pemerintah dan masyarakat akan tercipta komunikasi yang lebih efektif seiring dengan pertemuan-pertemuan yang tercipta.”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang turut serta dalam pelaksanaan program fisik, artinya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masih kurang baik.

Terlihat pula bahwa masyarakat merasakan sendiri manfaat atas keterbukaan pemerintah dalam melibatkan mereka. Dari proses pelibatan tersebut, tercipta komunikasi serta membangun kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat di wilayahnya untuk bekerja sama membangun kehidupan bernegara yang lebih baik. Melalui partisipasi masyarakat ini, diharapkan dapat menjadi refleksi bagi pemerintah Desa Pattallassang untuk banyak berhubungan langsung dengan masyarakat demi memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya.

Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja

Berikut beberapa hasil wawancara terkait partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja, sebagaimana yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa Pattallassang, bahwa:

“Masyarakat sepertinya telah mampu membaca peluang yang ada di depan mata mereka. Saat Perda RT/RW tentang Penetapan Kecamatan Pattallassang sebagai Persiapan Ibukota Baru

Kabupaten Gowa, kami melihat banyak warga yang memberanikan diri untuk membangun usaha rumahan dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah mereka sendiri. Hal ini kami nilai sangat positif, karena secara tidak langsung mereka telah membantu pemerintah membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal sekaligus membantu mengatasi masalah kemiskinan.”

Lebih lanjut Pelaksana Tugas Kepala Desa Pattallassang, mengatakan bahwa :

“Di Kecamatan Pattallassang ini, terdapat beraneka ragam perusahaan yang memang dirintis oleh masyarakat lokal dan selama beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat. Perkembangan itu kami anggap sesuatu yang positif dan perlu untuk tetap di dukung. Saat perusahaan-perusahaan kecil yang sudah cukup berkembang telah mampu mempekerjakan 1-10 orang tenaga kerja asli dari Kecamatan Pattallassang, maka artinya, masyarakat telah ikut andil menciptakan lapangan kerja”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri sudah mulai terlihat. Terbukti dengan banyaknya variasi dan jenis usaha yang dibangun oleh masyarakat setempat. Selain itu, tenaga kerja yang diberdayakan juga merupakan masyarakat asli yang bermukim di Kecamatan Pattallassang itu sendiri. Hal ini tentu merupakan angin segar, bahwa Kecamatan Pattallassang telah mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan hasil pengamatan, yang paling banyak menyerap tenaga kerja bukan hanya perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun, seperti minimarket, toko bahan bangunan atau material lainnya. Akan tetapi, berbagai macam jenis usaha di bidang kulinerpun dapat dipastikan semua pekerjanya diserap dari masyarakat lokal.

Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi

Berikut beberapa hasil wawancara terkait partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi, sebagaimana yang

disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Pattallassang, bahwa:

“Yang kami amati sampai saat ini, untuk menopang pembangunan usaha rumahan masyarakat, pemerintah memberi kemudahan bagi mereka dalam hal pengurusan izin usaha. Izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah desa ini biasanya dijadikan jaminan untuk mengajukan permohonan dana ke Bank perkreditan. Masyarakat yang memiliki kesadaran membangun usaha demi meningkatkan perekonomian keluarga mereka bisanya memanfaatkan lahan yang berada di pekarangan rumah mereka sendiri. Pemanfaatan lahan ini dapat dilihat di sepanjang jalan mulai dari perbatasan Kecamatan sombaopu sampai ke ujung jalan poros Pattallassang-Pallantikang”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa peluang untuk mengembangkan potensi sumberdaya masyarakat lokal masih besar meskipun tantangan yang dihadapi juga cukup besar. Tantangan tersebut berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, modal, jaringan kerja, dan jaringan pemerintah.

Pengembangan usaha ekonomi lokal sebagai sebuah strategi pengentasan kemiskinan, masyarakat miskin sebagai aset yang berpotensi menjadi kekuatan besar dalam memacu perkembangan ekonomi daerah jika potensi insaniah dapat dimobilisasi dan dikembangkan.

Pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pengembangan usaha ekonomi lokal dapat mendorong dan merangsang terciptanya jiwa kewirausahaan pada masyarakat dan tumbuhnya potensi ekonomis. Untuk mengatasi masalah kemiskinan diperlukan suatu model yang tepat, efektif, dan efisien diwujudkan dalam berbagai program pemberdayaan yang terpadu dan berkesinambungan. Model pengembangan ekonomi lokal tidak terlepas dari usaha untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat miskin.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mandiri atau tidaknya suatu desa dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya.

Semakin mandiri suatu desa maka semakin sedikit pekerjaan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dinilai belum optimal, dari aspek (1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan; (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan; (3) Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja; dan (4) Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi di tingkat desa hingga ke dusun, sehingga partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri dapat berjalan dengan maksimal.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Arisandy, W. (2015). Strategi Dinas Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Metode CRC (Citizen Report Card) di Kota Surabaya. (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Damopolii, R. V. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu)*. Jurnal Politico, Volume 3 Nomor 1.
- Edward III, (1980). *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Hapsari, S. K. (2016). *Pencegahan Kematian Ibu dan Anak melalui Pendekatan Strategi Komunikasi pada Program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival)*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 14(3).
- Hardisman, H. (2011). Pembangunan Terestegrasi sebagai Pendekatan Pemecahan Masalah Kesehatan di Indonesia. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 5(2), 94-99.
- Iskandarsyah, M. N. (2016). Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalam Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga di Puskesmas Puuwatu Kota Kendari

- Tahun 2015. Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, Vol.1, No.1.
- Jones, C. O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Terjemahan Ricky Ismanto. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahsyar, A. (2014). The Interaction Model Between Street-Level Bureaucrats and the Public in Health Service Provision at Puskesmas. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 21(1), 44-48.
- Mitra, M. (2012). (Masih) Masalah Kesehatan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 1(4), 170-170.
- Nainggolan, O., Hapsari, D., & Indrawati, L. (2016). Pengaruh Akses ke Fasilitas Kesehatan terhadap Kelengkapan Imunisasi Baduta (Analisis Riskesdas 2013). *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 26(1), 15-28.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pranata, S., Pratiwi, N. L., & Rahanto, S. (2011). Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, gambaran peran kader posyandu dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di kota Manado dan Palangkaraya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 14(2).
- Sampoerno, Does. (2008). Membangun Bangsa yang Sehat Produktif KESMAS, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 3, No. 1.
- Saputra, W., Fanggida, V., & Mafthuchan, A. (2013). Efektivitas kebijakan daerah dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi. *Kesmas: National Public Health Journal*, 7(12), 531-537.
- Suwitri, S. (2008). Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik, Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir Dan Rob Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin*, 6(3), 01-32.
- Tahjan, H. (2008), *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : RTH.